**PEMIDANAAN PELAKU DI ATAS TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT
UMUM PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst)**

Jesika Greis Duha

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
jesikagreisduha2000@gmail.com

Abstrak

Pembunuhan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Salah satu tindak pidana pembunuhan yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu putusan nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst. Pada putusan tersebut, pelaku dituntut selama 7 tahun penjara dan melanggar Pasal 338 KUHP dengan dakwaan alternatif pertama Pasal 351 ayat (3) KUHP, sedangkan hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku selama 10 tahun penjara karena diduga melanggar Pasal 338 KUHP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data skunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan pelaku di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tindak pidana pembunuhan (Studi Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst) adalah pidana yang dijatuhkan di atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, hakim boleh memutus di atas tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak ada ketentuan yang melarang hakim dalam memutus pemidanaan seseorang harus sesuai di bawah dan di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, bukan Pasal 338 KUHP yang dikenakan kepada pelaku, namun menggunakan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 351 ayat (3) agar terpenuhi unsur dari perbuatan yang dilakukan pelaku. Penulis menyarankan supaya hakim hendaknya harus memperhatikan lebih cermat dalam mempidana seseorang agar terpenuhinya unsur-unsur dalam suatu pasal yang dijerat kepada pelaku supaya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatannya.

Kata Kunci: *Pemidanaan; Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Tindak Pidana Pembunuhan.*

Abstract

Murder is an act to eliminate a person's life by violating the law, or not against the law. One of the crimes of murder that has been examined and tried by the Gunungsitoli District Court is decision

number 17/Pid.B/2021/PN.Gst. In the decision, the perpetrator was charged with 7 years in prison and violated Article 338 of the Criminal Code with the first alternative charge of Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code, while the judge sentenced the perpetrator to 10 years in prison for allegedly violating Article 338 of the Criminal Code. The type of research used is normative legal research with approach methods, namely legislation approach, case approach and analytical approach. Data was collected using secondary data obtained through library materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data analysis used is descriptive qualitative analysis and the conclusion is drawn using the deductive method. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the punishment of the perpetrator above the demands of the Public Prosecutor for the crime of murder (Study of Decision Number 17/Pid.B/2021/PN.Gst) is a crime imposed on the demands of the Public Prosecutor, The judge may decide above the demands in accordance with the laws and regulations because there is no provision that prohibits the judge in deciding the sentence of a person to be in accordance with the demands of the Public Prosecutor. In addition, it is not Article 338 of the Criminal Code that is imposed on the perpetrator, but uses the first alternative charge, namely Article 351 paragraph (3) in order to fulfill the elements of the act committed by the perpetrator. The author suggests that judges should pay more attention to the punishment of a person in order to fulfill the elements in an article that is charged to the perpetrator so that the sentence imposed is in accordance with his actions.

Keywords: *Criminalization; Public Prosecutor's Demands; The Crime of Murder.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (UUD 1945), yang artinya negara yang dalam menjalankan suatu tindakan semua harus berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dimana adanya anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara memberikan hukuman kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang berlaku serta melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh agar terciptanya keadilan hukum di tengah-tengah masyarakat. Tindak pidana yang terungkap saat ini, dimana sebagian besar tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam memberikan

laporan tentang adanya pelanggaran hukum dan dalam upaya membantu tugas aparat penegak hukum mengungkap adanya suatu tindak pidana (Laia, F. (2021).

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya di latar belakang oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya. Menurut Ulama Fikih pembunuhan dengan "perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang". Sedangkan menurut Wakban Zuhaili pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Dari definisi tersebut pembunuhan adalah perbuatan seseorang

terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (Yusuf, I, 2013: 1).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menentukan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara diluar penuntutan harus bebas dari kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam mengekkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan hak asasi manusia, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenanga kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan sebagai kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib mengali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu tindak pidana pembunuhan yang telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli yaitu putusan nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst. Pada putusan tersebut, pelaku terbukti melanggar Pasal

338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Jaksa menuntut 7 tahun, dan putusan hakim 10 tahun penjara. Jadi putusan hakim menentukan dibahas dan dianalisis karena tuntutan yang disebutkan melebihi hukuman dari jaksa penuntut umum.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *Pemidanaan Pelaku Di Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst)*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan di atas tuntutan jaksa penuntut umum (studi putusan nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst).

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan di atas tuntutan jaksa penuntut umum (studi putusan nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst).

4. Teori Yang Relevan

Dapat diketahui bahwa relevansi peneliti tersebut bahwa sama-sama membahas tentang Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti ini lebih menekankan pada metode penelitian data yuridis normatif dan data sekunder untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang “*Pemidanaan Pelaku Di Atas*

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Pembunuhan”.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang studi kepustakaan, yaitu menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tujuan dari pada jenis penelitian hukum normatif adalah untuk memberikan penjelasan cara menerapkan dan mengimplementasikan suatu peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup (Soerjono Soekanto, 1986: 34): (1) Penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) Penelitian terhadap sistematika hukum; (3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) Perbandingan hukum; (5) Sejarah hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), metode pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data skunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan yang deskriptif

dapat dilakukan dengan cara data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan kategori masing-masing, dianalisis secara logis, disusun secara sistematis dan koheren sehingga dapat disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi atau bersifat khusus.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus pada permasalahan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian dalam putusan pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst, yaitu:

a. Identitas Terdakwa

Identitas terdakwa dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst, sebagai berikut:

Nama Lengkap	: Yanuari Zai Alias Ama Jeri
Tempat Lahir	: Ulugawo
Umur/Tanggal Lahir	: 45 Tahun/18 Agustus 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun IV Hiliuso Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato kabupaten Nias
Agama	: Protestan
Pekerjaan	: Nelayan/Perikanan

b. Kasus Posisi

Kasus posisi dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst:

Bahwa terdakwa Yanuari Zai Alias Ama Jeri, pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias tepatnya di pinggir jalan umum atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yakni terhadap korban Firminus Faozanolo Gulo Alias Ama Yurdi, perbuatan mana terdakwa melakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB, ketika terdakwa Yanuari Zai Alias Ama Jeri sedang duduk diteras rumahnya di Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias kemudian korban Firminus Faozanolo Gulo Alias Ama Yurdi melintas di depan rumah terdakwa sambil membawa sebilah parang di pinggangnya setelah melewati rumah terdakwa sejauh 15 meter tiba-tiba korban berhenti dan melihat kearah terdakwa sambil korban berteriak mengucapkan kata-kata makian kepada terdakwa dan keluarganya serta memanggil-manggil nama terdakwa agar terdakwa datang menghampirinya, mendengar teriakan korban tersebut terdakwa kemudian berdiri dari tempat duduknya lalu menegur korban sambil berjalan kearah korban tiba-tiba korban juga menghampiri terdakwa dan saat itu terdakwa melihat korban telah memegang sebilah parang ditangan kanannya dan setelah korban berhadapan dengan terdakwa.

Kemudian korban berlari sambil mengayunkan parang ditangan kanannya kearah terdakwa sehingga dengan spontan

terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung menahan tangan kanan korban sambil berusaha merebut parang ditangan korban dan mendorong parang korban kearah leher korban namun korban mencoba untuk menahannya hingga pada akhirnya terdakwa mengaitkan kaki kanannya pada kaki korban sehingga korban terjatuh di badan jalan dengan posisi terduduk kemudian korban meninju wajah terdakwa menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa berhasil merebut parang dari tangan korban kemudian terdakwa terdakwa menggunakan parang milik korban tersebut langsung membacok leher dan wajah serta kepala bagian atas dan dada korban dengan berkali-kali sehingga korban tidak berdaya dan langsung tergeletak ditanah dengan tubuh bersimbah darah setelah itu terdakwa pergi meninggalkan korban dengan membawa parang milik korban menuju rumah terdakwa namun sesampainya terdakwa di belakang rumahnya.

Kemudian terdakwa membuang parang korban tersebut kearah rumput/semak-semak dibelakang rumahnya lalu terdakwa masuk kedalam rumahnya dan menjumpai istrinya yakni saksi Asni Halawa Alias Ina Jeri kemudian terdakwa mengatakan kepada istrinya "sudah kubunuh si Ama Yurdi" seterusnya terdakwa pergi keteras rumahnya kemudian terdakwa berteriak bermaksud untuk memberitahukan warga desa bahwa ia telah membunuh korban dan berharap ada warga desa yang mau membantunya untuk melihat keadaan korban apakah masih bisa untuk diselamatkan lalu terdakwa melihat saksi Sozatulo Lafau Alias Ama Wima melintas di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil

saksi Sozatulo Lafau Alias Ama Wima berkali-kali namun saksi Sozatulo Lafau Alias Ama Wima tidak mau selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumahnya dan berjalan kearah anak tangga di dalam rumahnya dan mengambil sebilah parang kemudian terdakwa keluar dari rumahnya menuju tempat kejadian guna memastikan korban telah meninggal setelah melihat korban sudah tidak bernyawa di tempat kejadian.

Kemudian terdakwa berjalan kearah rumah Kepala Desa Gazamanu untuk melaporkan kejadian pembunuhan yang dilakukannya terhadap korban tiba-tiba di perjalanan terdakwa bertemu dengan Kepala Desa Gazamanu yakni saksi Tribakti Lase Alias Ama Eldest yang saat itu sedang berboncengan diatas sepeda motor bersama dengan saksi Angelama Lase Alisa Ama Delvan yang disusul dari belakang oleh saksi Fanolo Lase Alias Ama Juwita kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Tribakti Lase Alias Ama Eldest bahwa ia telah membunuh korban dan meminta kepada saksi Tribakti Lase Alias Ama Eldest untuk mengantarkannya ke Polsek Bawolato kemudian terdakwa menyerahkan parangnya kepada saksi Angelama Lase Alisa Ama Delvan lalu saksi Tribakti Lase Alias Ama Eldest bersama-sama dengan saksi Angelama Lase Alisa Ama Delvan dan saksi Fanolo Lase Alias Ama Juwita membawa terdakwa beserta barang barang bukti ke Mapolsek Bawolato untuk menyerahkan diri.

c. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian di Pengadilan Negeri Gunungsitoli studi putusan nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst merupakan bagian terpenting dari proses peradilan sebagai upaya untuk mencari keadilan serta dalam rangka menjamin

adanya kepastian hukum bagi warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tingkat penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan merupakan bagian integral dari upaya penegak hukum (*law enforcement*) dalam rangka pembuktian fakta-fakta hukum di persidangan (*judex factie*). Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan.

Proses peradilan merupakan jalan penyelesaian perkara pidana yang meliputi penyelidikan, penuntutan dan persidangan. Adanya produk hukum yakni putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*) merupakan tanda berakhirnya penyelesaian perkara pidana. Dalam hal Majelis Hakim membacakan putusan akhir, tentunya ada pihak yang tidak dapat menerimanya, baik itu dari pihak pelaku atau penasehat hukum, Jaksa Penuntut Umum, maupun masyarakat. Pada umumnya isi putusan hakim ada tiga yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Andi Hamzah, 2001: 280). Dalam hal hakim menjatuhkan putusan di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah pasti pelaku atau penasehat hukum keberatan terhadap putusan pengadilan tersebut.

Putusan merupakan aspek penting di dalam penyelesaian perkara pidana. Maka dari itu di Indonesia menganut sistem atau teori pembuktian yakni sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*). Pada prinsip sistem pembuktian ini menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pindana terhadap terdakwa apabila alat bukti yang

telah ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung oleh adanya keyakinan hakim terhadap alat-alat bukti tersebut (Lilik Mulyadi, 2007: 112).

Salah satu penegak hukum di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHAP. Dalam KUHAP dijelaskan bahwa dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat sehingga dapat ditemukan siapakah palaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011: 7-8).

Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara dituntut harus berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan, moral hukum dan kaidah hukum sebagai pertimbangan putusnya terhadap suatu perkara demi tegaknya keadilan, kepastian dan ketertiban hukum yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri (Wijayanta dan Heri Firmansyah, 2011: 42). Sering terjadi fenomena hakim yang menjatuhkan putusan kurang cermat dan teliti tanpa mempertimbangkan atau mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur yuridis dan unsur non yuridis dalam perkara yang diperiksa sehingga putusan itu dibatalkan atau dirubah oleh putusan di tingkat selanjutnya.

Pertimbangan hakim dalam mengambil suatu putusan pemidanaan pelaku di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tindak pidana pembunuhan adalah hal-hal yang memberatkan yaitu dampak dari perbuatan pelaku, diantaranya perbuatan yang meresahkan masyarakat, besarnya kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi pelaku. Sebagaimana ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP bahwa musyawarah majelis hakim didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan. Dengan tetap mengacu pada surat dakwaan, majelis bermusyawarah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan *a quo* dua alat bukti yang sah dan meyakinkan Pasal 183 ayat (3) menentukan "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya" kemudian memutuskan hukuman yang sesuai dengan pertimbangan hukum majelis baik yang meringankan maupun yang memberatkan pelaku.

Kaitanya dengan perkara ini bahwa alat bukti yang sah itu untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim, yakni keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa. Selain itu, juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti, maka akan diperoleh fakta

hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, penulis menganggap bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk berupa barang bukti dan keterangan terdakwa menunjukkan kesesuaian antara satu sama lain. selain itu, juga terdapat kesesuaian antara alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga itu menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan bahwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di hadapan persidangan.

Berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka dalam putusan hakim menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 7 tahun penjara. Putusan hakim yang merupakan pidana di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan tindakan yang dapat merugikan bagi pelaku.

Pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana berupa pidana di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwanya yang pada intinya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh serta diajukan dalam persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum meminta hakim menyatakan terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP kemudian menjatuhkan pidana terhadap pelaku selama 7 tahun dikurangi selama pelaku berada dalam tahanan sementara pelaku tetap ditahan.

Berdasarkan uraian tentang pidana pelaku di atas tuntutan Jaksa

Penuntut Umum pada tindak pidana pembunuhan yaitu bahwa hakim dalam memutus perkara harus didasarkan atas hukum dan rasa keadilan serta bilamana melakukan penafsiran, konstruksi maupun penemuan harus berpegang teguh kepada asas-asas hukum umum.

Selain itu dalam konteks penggunaan penafsiran oleh hakim juga selalu terkandung isi putusan hukum pidana yang dibentuknya, misalnya berkaitan dengan pidana terhadap pelaku kejahatan. Apakah yang menjadi landasan dan tujuan pidana yang dijatuhkan dan bagaimanakah akibat bagi kepentingan diri pelaku, korban, masyarakat, bangsa dan negara pasca putusan itu dijatuhkan serta teori pidana yang mana akan digunakan dan diyakini sesuai dengan perkembangan perubahan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan atas filosofi dan teori pidana, maka hakim dapat memutuskan sesuai atau tidaknya dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam praktiknya hakim bisa dan dimungkinkan untuk menerobos atau di atas tuntutan maksimum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selama masih dalam koridor atas maksimum ancaman pidana pasal yang di dakwakan. Terlebih lagi secara normatif tidak ada ketentuan Undang-Undang khususnya KUHP yang mengharuskan hakim menyesuaikan putusan pidananya dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya hakim memiliki kebebasan untuk mempidana di bawah maupun di atas tuntutan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan atau filosofi pidana yang dianutnya baik bagi kepentingan pelaku, korban, kepentingan masyarakat

atau umum maupun bagi eksistensi negara hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa penulis dalam hasil penelitian dalam kasus pemidanaan pelaku di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tindak pidana pembunuhan dapat ditemukan bahwa fakta persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan sehingga hakim memiliki keyakinan untuk menjatuhkan pidana di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka hal ini tidak melanggar Hukum Acara Pidana. Hakim dapat memutus lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang *judex factie* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex factie* yang menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa hakim boleh memutus di atas tuntutan akan tetapi tidak boleh melebihi batas maksimum ancaman pidana yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Karena tidak ada satu pasal atau teori yang mengatur bahwa pemidanaan harus sesuai atau pun di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak diperbolehkan melebihi tuntutan tersebut (*ultra petitum*).

Maka dari itu pertimbangan hukum yang cukup terkait adanya hal-hal yang memberatkan dengan didasari sebuah keyakinan dan keadilan substantif dapat menjadi landasan konstitusional bagi hakim menjatuhkan putusan pemidanaan di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim memiliki kebebasan untuk mempidana di atas tuntutan untuk memenuhi rasa keadilan dan nurani atau keyakinan yang dimilikinya terhadap tujuan dan filosofi pemidanaan yang dianut baik bagi kepentingan pelaku, korban, kepentingan masyarakat atau umum maupun bagi eksistensi negara.

Berdasarkan temuan penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst, penulis berpendapat bahwa dalam pemidanaan di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal identitas terdakwa dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama, dalam membuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum memuat identitas pelaku sekurang-kurangnya nama lengkap, tempat lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan pelaku.

Berdasarkan temuan penelitian dalam hal duduk perkara bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dimana pelaku melanggar Pasal 338 KUHP menentukan bahwa "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun". Menurut penulis, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ada beberapa unsur-unsur Pasal 338 KUHP yang tidak memenuhi berdasarkan kronologi kasus dan berdasarkan pembuktian di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Dalam hukum pidana, seseorang tidak boleh didakwakan bersalah melanggar suatu pasal apabila tidak terpenuhi satu unsur-unsur dari pasal tersebut.

1. Barang siapa

Barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Dalam persidangan pelaku telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh majelis hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan pelaku, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Yanuari Zai Alias Ama Jeri adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan pelaku ke persidangan (*error in persona*).

Selama proses pemeriksaan dimuka persidangan, pelaku dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan pelaku tidak sehat jasmani dan rohani.

2. Dengan sengaja

Mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau *opzetilijk* haruslah mengajukan adanya hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya.

Jika dihubungkan arti “dengan sengaja” tersebut didapati kenyataan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu perbuatan yang tidak dikehendakannya, hal ini dapat dilihat dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dilakukan karena diselimuti perasaan jengkel terhadap korban karena sikap dan perkataan korban terhadap pelaku dan keluarga si pelaku, sehingga pelaku berdiri dari duduknya lalu menegur korban atas perbuatannya.

Menurut penulis unsur kesengajaan ini tidak terpenuhi, sebab pelaku Yanuari

Zai alias Ama Jeri dalam keterangannya di persidangan bahwa ia tidak pernah menghendaki dan membayangkan sebelumnya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Dalam pembuktian di persidangan, terdakwa ingin menegur korban atas perbuatannya dan korban ingin mau membunuh terdakwa sehingga terdakwa dengan spontan menahan parang dari tangan korban dan tidak ada niat sebelumnya untuk membunuh.

3. Menghilangkan nyawa orang lain

Berdasarkan fakta yang terungkap suatu tindakan tersebut dapat dilakukan tanpa orang tersebut melakukan suatu perbuatan atas hal tersebut ada beberapa pendapat para sarjana antara lain Simons yang menyatakan tanpa melakukan sesuatu orang juga dapat bersalah melaakukaan kejahatan-kejahatan menghilangkan nyawa. Senada dengan itu Van Hamel menyatakan delik-delik *omisi* tidak murni itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah besar tindak pidana yang dapat dilakukaan orang, baik dengan melakukan sesuatu maupun tanpa melakukan sesuatu, delik-delik ini sendiri merupakan perilaku untuk menimbulkan suatu akibat, dimana perilaku seperti itu pada umumnya adalah terlarang diancam pidana.

Berdasarkan kronologi kasus dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan ke persidangan bahwa korban mencoba membunuh pelaku. Dapat dibuktikan dengan bukti surat hasi Visum Et Repertum Nomor 440.1/1663/Yankes/2020 tanggal 6 November 2020 yang diatur dan ditandatangani oleh dr.Yuniarman Waruwu selaku dokter pemerintah pada UPTD. Berdasarkan bukti surat tersebut atas tindakan yang dilakukannya pelaku

membuat penulis bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut menurut penulis dalam unsur-unsur Pasal 338 KUHP masih ada satu pasal yang tidak terpenuhi harusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif pertama Pasal 351 ayat (3) “ jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”, agar terpenuhinya tindak pidana yang dilakukan pelaku. Sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan hukum juga dapat diperhatikan dan dicermati oleh hakim dengan lebih baik lagi.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan, dimana akibat kematian yang ditimbulkan bukan merupakan tujuan pelaku. Tindak pidana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal tersebut memuat hal-hal mengenai penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian. Akibat berupa penganiayaan tersebut meskipun demikian, bukanlah yang dituju oleh pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh karenanya harus dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, maka sanksinya yaitu pidana penjara paling lama tujuh tahun penjara.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yaitu:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orang

Dari unsur-unsur tersebut kemudian hakim menetapkan hukuman kepada pelaku yang disesuaikan juga dengan Undang-Undang yang berlaku serta pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka hakim memutuskan menghukum pelaku dengan pidana penjara selama 10 tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut.

Dalam perkara ini, seharusnya penuntut umum dan khususnya majelis hakim lebih mencermati lagi tindak pidana yang dilakukan pelaku. Perlu adanya pemahaman yang mendasar mengenai pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Karena perbuatan tersebut walaupun memiliki sifat yang sama yakni menyebabkan mati orangnya, namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri sebagai pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan penganiayaan yang menyebabkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Pada kasus ini, majelis hakim harus lebih mencermati kronologi kejadian sebagaimana keterangan para saksi, pelaku pada dasarnya tidak mempunyai niat untuk membunuh korban. Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan Pasal 351 ayat (3) KUHP menentukan bahwa “jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Menurut penulis dalam kronologi kasus, bahwa ketika pelaku mau menegur korban atas perbuatan yang tidak menyenangkan bagi pelaku, tiba-tiba korban juga

menghampiri pelaku dan saat itu pelaku melihat korban memegang sebilah parang di tangan kanan korban kemudian korban mengayunkan parang tersebut ke arah pelaku sehingga spontan terdakwa menahan tangan korban dan berusaha merebut parang korban dan mendorong parang tersebut ke arah korban namun korban menahannya pada akhirnya pelaku mengaitkan kaki korban dan korban terjatuh dengan posisi duduk, kemudian korban meninju wajah pelaku lalu pelaku berhasil merebut parang di tangan korban kemudian pelaku melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian.

Berdasarkan kronologi tersebut penulis berpendapat bahwa tersebut pelaku dan korban melakukan perkelahian dimana korban masih melakukan perlawanan terhadap pelaku. Harusnya Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif pertama Pasal 351 ayat (3) KUHP untuk menjerat pelaku agar tepenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan pelaku.

Berdasarkan temuan penelitian pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst, bahwa hakim dalam melakukan pemidanaan di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih banyak hal-hal yang tidak diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Dalam putusannya selain mempertimbangkan dakwaan, keterangan sanksi, keterangan terakwa, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku dari tindak pidana yang dilanggar apakah sudah terpenuhi atau tidak.

Dalam KUHP telah megatur dan menentukan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang termuat dalam Pasal 338 KUHP menentukan bahwa "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun".

Selain dari pada itu dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada pelaku merupakan upaya hukum untuk memperbaiki pelaku melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofis pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga telah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan kemungkinan besar tidak melakukan kejahatan lagi. Menurut penulis, penjatuhan hukuman selama 10 (sepuluh) tahun hal itu merupakan pemidanaan di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Adapun penjatuhan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang ada dalam diri pelaku dalam sikap pelaku setiap harinya dilingkungan masyarakat serta hal-hal yang ditemukan selama proses persidangan berlangsung, terlebih dahulu melihat hal yang memberatkan dan meringankan pelaku sebagai berikut: (a) Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan pelaku meresahkan masyarakat. (b) Keadaan yang meringankan: (1) Pelaku mengaku dan menyesali perbuatannya; (2) Pelaku berjanji tidak akan mengulangnya lagi; dan (3) Pelaku melapor dan menyerahkan diri kepada Polisi di Polsek Bawolato.

Dalam temuan penelitian dan pembahasan, penulis telah menguraikan bahwa hakim harus memperhatikan suatu pemidanaan di atas tuntutan jaksa

penuntut umum, beberapa hal yang menjadi proses dalam persidangan, yaitu tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan sanksi, hal-hal yang memberatkan dan meringankan oleh karena itu, pelaku ditetapkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan demikian hakim menjatuhkan hukuman terhadap pelaku dengan Pasal 338 KUHP.

Hal utama yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah yaitu bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan di atas tuntutan jaksa penuntut umum (studi putusan nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst). Tujuan peneliti ini yaitu mengetahui dan menganalisis pemidanaan pelaku di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai putusan yang digunakan. Penulis mendapatkan suatu hal yang menerangkan bahwa pelaku tidak dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) menentukan bahwa penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun penjara kepada pelaku tindak pidana pembunuhan (studi putusan nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst).

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa pemidanaan pelaku di atas tuntutan jaksa penuntut umum pada tindak pidana pembunuhan (studi putusan nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst) bahwa menurut penulis pidana yang dijatuhkan di atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, hakim boleh memutus di atas tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak ada ketentuan yang

melarang hakim dalam memutus pemidanaan seseorang harus sesuai di bawah dan di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, bukan Pasal 338 KUHP yang dikenakan kepada pelaku, namun menggunakan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 351 ayat (3) agar terpenuhi unsur dari perbuatan yang dilakukan pelaku.

2. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan tersebut penulis menyarankan supaya hakim hendaknya harus memperhatikan lebih cermat dalam mempidana seseorang agar terpenuhinya unsur-unsur dalam suatu pasal yang dijerat kepada pelaku supaya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatannya.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Adnan, Wahyu. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Bandung: Gunung Aksara.
- Ansori Sabuan, dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Anwar. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Cipta Adya Bakti.
- Ali, Zainudin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2007. *Kejahatan Terhadap Nyawa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ediwarman, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: PT. Sofmedia.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

- Hakim, Rahmat. 2010. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2011. *KUHP dan KUHP edisi revisi*. Bogor: Rineka Cipta.
- Jur, Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi II. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia,
- M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung, Erdiantio. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditima.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum Edisi Refisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: P.T. Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana-Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan permasalahannya*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Tertentu Pidana Di Indonesia*. Surabaya: Fuad Eskrim.
- Saleh, Roeslan. 1987. *Stetsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soedarto. 1996. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soedarto. 1997. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bulan Bintang Bintang.
- Wijayanta dan Heri Firmansyah. 2011. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Zulkarnian. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.
- 2. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- 3. Jurnal**

- Failin. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum. Volume 3. Nomor 1.
- Hulu, K. I. 2018. *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak*. Jurnal education and devolopment, 5 (1).
- Laia, F. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan. *Syntax Idea*, 3(4), 763-778.
- Yusuf, I. 2013. *Pembunuhan dalam perspektif hukum islam*. Jurnal. Volume 13 Nomor 2.

4. Internet

- <https://www.azalawoffice.com.uu.nomor.16.tahun2004.tentang.kejaksanaan>.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>